**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**BAGI HASIL PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan desa melalui pemberian bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bantuan keuangan kepada desa dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bantuan keuangan kepada desa dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Sumbangan dan Bantuan serta pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang berada dalam Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagian dari hasil pajak dan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa.

B A B II

PEMBAGIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

Sebagian hasil dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten diberikan kepada desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Pasal 3

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 4

Penetapan alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa dianggarkan setiap tahun pada APBD.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten setiap tahun menganggarkan dana untuk bantuan keuangan kepada setiap desa.

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa disatukan dengan dana bantuan keuangan kepada desa.

(2) Pemberian dana sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh pemerintah desa dimasukkan dalam APB Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Daerah Tingkat II Muara Enim Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1991 Nomor 1 Seri A) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1991 Nomor 2 Seri A) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS